



Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau

Eko Handrian¹ Hendry Andry²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
ekohandrian@soc.uir.ac.id hendryandry@soc.uir.ac.id

Received : Maret 1, 2020; Accepted : April 13, 2020
DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995

Abstract

The description of poverty in Riau Province, there are several regions with high poverty rates, including Meranti Islands District (33.85%) and Pelalawan (11.15%). The preparation of the Riau Provincial Regional Action Plan is a form of commitment to accelerate development and priority development programs in Riau Province which have not been previously achieved in the MDGs marked by the issuance of Governor Regulation No. 33 of 2018 dated 5 June 2018 concerning RAD TPB / SDGs in 2017-2019 . This research is a literature study, participatory and inclusive approach is the principle of implementing SDGs carried out in each stage of the regional action plan of Riau province. The integration of the RPJMD and RAD in Riau Province is the focus of acceleration in achieving the SDGs goals by synchronizing the SDGs objectives with the objectives of the Riau RPJMD. The SDGs' priorities are based on how big the problems are in the regions, the SDGs-related agenda refers to the national plan, the approach used by local governments that the idea of development is a support for regional development priorities in line with the vision and mission of the regional head. In addition, synchronization and acceleration of the implementation of SDGs need to be built in institutions including structures, coordination and communication mechanisms, information sharing, monitoring and evaluation. .

Key Words : Acceleration, Achievement, SDGs

Abstrak

Gambaran kemiskinan di Provinsi Riau terdapat beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi antara lain Kabupaten Kepulauan Meranti (33,85%) dan Pelalawan (11,15%). Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Riau merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mempercepat pembangunan dan prioritas program pembangunan di Provinsi Riau yang sebelumnya belum tercapai pada MDGs ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang RAD TPB/SDGs tahun 2017-2019. Penelitian ini merupakan studi literatur, Pendekatan Partisipatif dan inklusif adalah prinsip pelaksanaan SDGs dilaksanakan dalam setiap tahapan penyusunan rencana aksi daerah provinsi Riau. Integrasi RPJMD dan RAD Provinsi Riau menjadi fokus percepatan dalam pencapaian tujuan SDGs dengan mensinkronisasi kembali tujuan SDGs dengan tujuan RPJMD Riau. Adapun prioritas SDGs didasarkan pada seberapa besar permasalahan yang terdapat di daerah, agenda terkait SDGs mengacu kepada rencana nasional, pendekatan yang digunakan pada pemerintah daerah bahwa ide pembangunan adalah pendukung bagi prioritas pembangunan daerah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. selain itu sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan SDGs perlu dibangun kelembagaan mencakup struktur, mekanisme koordinasi dan komunikasi, sharing informasi, monitoring dan evaluasi.

Key Words : Percepatan, Pencapaian, SDGs

Pendahuluan

Provinsi Riau termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 2,3 juta orang atau 37 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Hampir dua dari 5 anak tinggal di wilayah perkotaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.

Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumber daya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan. Sustainable Development Goals dianggap layak atau lebih baik dari Millenium Development Goals yaitu SDGs lebih global dalam mengkolaborasi programnya. Provinsi Riau memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan SDGs yang mana pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap tujuan-tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi-orientasi strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan.

Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin Provinsi Riau sebanyak 500.260 jiwa atau 8,65% dari total penduduk Provinsi Riau menurun menjadi 472.450 jiwa atau 8,17% dari total penduduk Provinsi Riau pada tahun 2011. Pada tahun 2012 - 2015, jumlah penduduk miskin berfluktuatif

meningkat dan persentase penduduk miskin berfluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.23 dan Gambar 2.24. Selama periode 2010 – 2015, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau rata-rata meningkat sebesar 2,61% per tahun dan persentase penduduk miskin juga ikut meningkat sebesar 0,57% per tahun.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau sebesar 7,99% pada tahun 2014 lebih rendah dari tingkat kemiskinan Indonesia (8,16%) dan tingkat kemiskinan di Sumatera (9,33%). Tingkat kemiskinan Provinsi Riau pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (5,61%) dan Sumatera Barat (5,41%), meski lebih baik dibanding tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (9,81%), dan Jambi (10,67%)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2014-2019, hanya 12 persen program kerja yang sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Meski begitu program kerja dari RPJMD 2019-2024 Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendatang, diyakini akan dapat mencapai 75 persen dari target SDGs. Untuk penyusunan RPJMD 2019-2024 ini Riau menargetkan 75 persen program Pemda bisa mencapai tujuan SDGs, sebelum target penuh 100 persen pada 2030 mendatang

Target dan tujuan SDGs secara eksplisit dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energy, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini

tergambar dalam 4 (empat) pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan. Secara umum, pilar, target dan tujuan SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah.

Pencapaian Provinsi Riau dalam penurunan kemiskinan termasuk terbaik secara nasional namun masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau sebesar 7,95%. Pemerintah Provinsi Riau melibatkan sejumlah perusahaan yang konsen terhadap 17 tujuan dalam RAD-TPB SDGs, karena menjadi bagian amanah dalam pasal 15 Perpres No.59 tahun 2017.

Tinjauan Pustaka

SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini :

1. Tanpa Kemiskinan ; Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan ; Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan ; Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas ; Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
5. Kesetaraan Gender ; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi ; Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau ; Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak ; Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur ; Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan ; Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas ; Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab ; Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim ; Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut ; Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat ; Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara

berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian ; Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ; Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang terdepan dalam menunjukkan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Provinsi Riau adalah provinsi pertama yang telah menetapkan RAD TPB SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018.

Pemerintah Provinsi Riau, segera mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDGs ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2018. (Antara Riau, <http://www.antarariau.com> diakses pada 28 Oktober 2018)

(Ishartono & Raharjo 2015) SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk anti diskriminasi.

(Wahyuningsih 2018) SDG's memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di

tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

(Ngoyo 2015) Salah satu pendekatan yang menurut penulis dapat diadaptasi adalah pendekatan model Partisipatory Rural Appraisal (PRA). PRA sendiri merupakan pendekatan yang diadopsi dan dipopulerkan oleh Robert Chambers. Yang menjadi inti dari pendekatan partisipatoris Chambers ialah ide bahwa kesenjangan antara asumsi-asumsi dasar dari para peneliti dan kebutuhan-kebutuhan riil mereka yang membutuhkan bisa diatasi dengan menciptakan kondisi-kondisi yang didalamnya objek-objek dari penelitian pembangunan dan/atau objek-objek dari pembangunan akan bisa memberikan sumbangan yang lebih aktif terhadap sasaran-sasaran dan secara ideal mendefinisikan tujuan-tujuan dari pembangunan dan penelitian pembangunan.

(Pribadi 2017) Pemerintah setempat juga hanya akan berhasil dalam melaksanakan agenda besar ini jika adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti Pemerintah setempat juga hanya akan berhasil dalam melaksanakan agenda besar ini jika adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti anggota parlemen, pemimpin daerah, masyarakat lokal, masyarakat sipil, pemuda, komunitas agama, serikat buruh, pelaku bisnis dan akademisi untuk menjalankan RAD SDGs ini serta tatakelola pelaksanaan program yang transparan, kemitraan produktif dengan berbagai organisasi masyarakat madani, dan pengembangan kebijakan dan pendekatan menyeluruh untuk mewujudkan.

Metode

Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama. Studi Literatur cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Pembahasan

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam Our Common Future, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan the world Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987.

SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumber daya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Sudah lebih dari satu tahun penancangan Komitmen Global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), namun belum ada informasi tentang bagaimana pencapaian SDGs di Indonesia ataupun daerah-daerah di Indonesia selama dua tahun terakhir ini.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN)

TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain :

1. RPJMN 2015-2019;
2. Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD;
4. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;
5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
6. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
7. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait:
 - (a) Dokumen global: Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development,
 - (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020,
 - (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024,
 - (d) JAKSTRA PB,
 - (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2015-2019,
 - (f) Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN No. xxx tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Pergub untuk tingkat daerah;
2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
3. Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:
 - a. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
 - b. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
 - c. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 - d. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs
4. Melaksanakan pembahasan Draf II Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;
5. Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasa dari masing-masing Pokja;

6. Melakukan Penyempurnaan Draft Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;
7. Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Ka. Bappenas)
8. Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.
9. Melakukan penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional.

Table. 1.
Indicator SDGs

No	Pilar	Goal	Indikator	Proporsi Per Indikator								
				Matched	Persen (%)	Proxy	Persen (%)	Will be Developed	Persen (%)			
A	Sosial	1. Tanpa Kemiskinan	12	5	41,67	2	16,67	5	41,67			
			14	2	14,29	5	35,71	7	50,00			
			26	4	15,38	8	30,77	14	53,85			
			11	2	18,18	5	45,45	4	36,36			
			14	1	7,14	4	28,57	9	64,29			
Sub Total			77	14	18,18	24	31,17	39	50,65			
B	Ekonomi	7. Energi Bersih & Terjangkau	6	2	33,33	0	0,00	4	66,67			
			17	3	17,65	1	5,88	13	76,47			
			12	1	8,33	3	25,00	8	66,67			
			11	1	9,09	0	0,00	10	90,91			
			25	2	8,00	3	12,00	20	80,00			
			Sub Total			71	9	12,68	7	9,86	55	77,46
			C	Lingkungan	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	11	1	9,09	5	45,45	5	45,45
15	1	6,67				7	46,67	7	46,67			
13	1	7,69				3	23,08	9	76,92			
7	1	14,29				3	42,86	3	42,86			
10	2	20,00				3	30,00	5	50,00			
14	2	14,29				3	21,43	9	64,29			
Sub Total						70	8	11,43	24	34,29	38	54,29
D	Hukum dan Tata Kelola	16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	23	0	0	7	30,43	16	69,57			
Sub Total			23	0	0	7	30,43	16	69,57			
Total			241	31	12,86	62	25,73	148	61,41			

Masih sedikit indikator RPJMD yang sesuai dengan indikator SDGs, perlu penajaman indikator program RPJMD, perlu sinergi program dengan non pemerintah, serta perlu dukungan data yang valid.

Berdasarkan hasil analisis terdapat banyak indikator RPJMD yang telah selaras dengan 241 indikator SDGs. Ditemukan terdapat 31 indikator RPJMD Provinsi Riau yang sesuai dengan indikator SDGs (12,86%), 62 indikator yang mendekati indikator SDGs atau sekitar 25,73%, dan sisanya 148 indikator atau 61,41% indikator daerah yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung pencapaian indikator SDGs. Dengan adanya 31 indikator yang sama dengan indikator global memberikan arti bahwa Pemerintah Provinsi Riau perlu kerja

keras dan upaya bersama untuk membangun sebanyak mungkin indikator daerah yang dapat mendukung pada pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perlu untuk melakukan upaya percepatan pencapaian sasaran target SDGs. Pemerintah kabupaten/kota masih tetap perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan TPB SDGs. Untuk itu, diperlukan kelengkapan data, indikator TPB SDGs sebagai turunan aplikatif dari RAD Pemerintah Provinsi Riau dan juga penyusunan program daerah yang selaras dengan RAD, RPJMD, dan RPJMN untuk semakin disesuaikan dengan TPB/SDGs.

Pemantauan dan evaluasi tersebut tidak hanya meliputi pemerintah daerah, namun juga pemangku kepentingan lainnya dengan membangun Sistem self-voluntary sebagai bentuk komitmen dalam pelaporan pencapaian program TPB SDGs di kalangan pemangku kepentingan non pemerintah.

Pemerintah Provinsi Riau telah berkomitmen untuk menjadikan Agenda SDGs sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah dengan mengikut sertakan seluruh aktor pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan tujuannya dalam rangka mengentaskan kemiskinan, menciptakan kondisi ekonomi yang baik dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagai sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia, Kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDGs kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030.

Untuk melakukan upaya percepatan pencapaian sasaran/target SDGs, pemerintah kabupaten/kota masih tetap

perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Diperlukan kelengkapan data, indikator TPB/SDGs sebagai turunan aplikatif dari RAD Pemerintah Provinsi Riau dan juga penyusunan program daerah yang selaras dengan RAD, RPJMD, dan RPJMN untuk semakin disesuaikan dengan TPB/SDGs.

Capaian pelaksanaan program-program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari pengimegrasian tersebut. Selain itu, pemantauan dan evaluasi tersebut tidak hanya meliputi Pemda saja. Namun juga pemangku kepentingan lainnya dengan membangun Sistem self-voluntary sebagai bentuk komitmen dalam pelaporan pencapaian program TPB/SDGs di kalangan pemangku kepentingan non pemerintah.

RAD SDGs disusun melalui pendekatan partisipatoris dengan melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, filantropi, media dan akademisi. Sedangkan dalam penyusunan para pemangku kepentingan daerah diberi ruang untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai kebutuhan. Untuk mencapai itu perlu kelengkapan data indikator SDGs, sebagai turunan dari RAD, RPJMD dan RPJMN agar semakin sesuai dengan DSGs.

Hingga saat ini, tahapan pelaksanaan SDGs yang telah dan sedang dilaksanakan di Provinsi Riau adalah:

1. Pembangunan kesadaran dan pembentukan kelembagaan
2. Dalam proses penyelesaian pengintegrasian agenda SDGs kedalam agenda pembangunan daerah
3. Membangun kemitraan dengan sektor bisnis melalui Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan/TJSP dan

4. Membangun sistem data untuk monitoring dan evaluasi pembangunan

Pemprov Riau mengupayakan program kerja pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2019-2024 mendatang, bisa mencapai 75 persen dari target sustainable development goals(SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai target 75 persen dari tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu upaya bersama dari lintas sektoral. Selain itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat, khususnya dari Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan yang terkait lainnya agar menyiapkan regulasi pendukung.

Proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat Peraturan Presiden No 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Gubernur dan Bupati/Walikota bersama-sama dengan seluruh aktor pembangunan antara lain organisasi masyarakat, pelaku usaha, filantropi, akademisi, dan pihak terkait lainnya menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs.

Gambar. 1.
Dukungan Pemerintah Provinsi Riau Melalui RPJMD Provinsi Riau (2014-2019) Terhadap Pencapaian SDGs



Dapat pula dianalisa keselarasan indikator RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dengan indikator SDGs yang sama terdapat 31 Indikator pembangunan daerah dengan indikator global SDGs (31 indikator atau 12,86% dari 241 indikator global). Sementara yang mendekati terdapat 62 Indikator pembangunan daerah dengan indikator global SDGs (62 indikator atau 25,73% dari 241 indikator global). Kemudian yang akan dikembangkan terdapat 148 indikator dalam rangka mendukung penuh pencapaian indikator global (148 atau 61,41% dari 241 indikator).

Kemitraan harus diperbaiki untuk memberi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing aktor yang berbeda terhadap SDGs. Pengalaman dari Millennium Development Goals 2000-2015 telah menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor swasta seringkali tidak ditangkap secara memadai oleh statistik pemerintah, yang biasanya berfokus pada program pemerintah. Pengukuran kontribusi sektor swasta penting untuk melacak upaya nasional secara keseluruhan terhadap SDGs. Sertifikasi SDGs yang diberikan kepada perusahaan swasta akan memberi pengakuan dan insentif untuk mendukung SDGs di Indonesia.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs (RAD SDGs) merupakan momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk mewujudkan komitmen, didalam mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan. Riau sebagai salah satu provinsi yang telah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk melaksanakan SDGs dengan membentuk kelembagaan melalui SK Gubernur Riau meskipun peraturan presiden belum ditandatangani.

RAD-TBP/SDGs ini merupakan bentuk kebijakan dalam bentuk dokumen

rencana bersama atau akumulasi rencana kerja bersama antar pemda dan non pemerintah di Provinsi Riau dan kabupaten dan kota se-Riau, Pemerintah Riau melibatkan sejumlah perusahaan yang konsen terhadap 17 tujuan dalam RAD-TPB SDGs.

Prinsip utama agenda pembangunan berkelanjutan dalam RAD adalah inklusi dan partisipasi. Selain konsultasi, berbagai platform dibutuhkan di tingkat nasional dan daerah yang akan mempertemukan pemerintah, penanam modal, perusahaan, filantropi, masyarakat madani dan akademisi dan mendorong kemitraan nyata.

Dalam pelaksanaan RAD SDGs melibatkan masyarakat secara partisipatif akan mendorong masyarakat tidak hanya mengkaji melainkan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan sejak mulai mengenal kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai mengevaluasi kegiatan.

Membangun pemahaman publik pentingnya SDGs dan relevansi keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan dan pencapaiannya serta perspektif SDGs dalam setiap penyusunan agenda pembangunan daerah. adapun sasaran seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha, filantropi, akademisi, media, kelompok masyarakat melalui pertemuan sosialisasi, share informasi berbasis website dan berita media serta talkshow radio.

Terdapat beberapa tantangan dalam penyusunan RAD TPB SDGs Riau antara lain : Penentuan Target Capaian masing-masing Indikator SDGs karena data belum/tidak tersedia, Program dan Kegiatan pada OPD yang belum/tidak "support" terhadap indikator SDGs, Justifikasi penentuan program dan

kegiatan paling “support” terhadap indikator SDGs, Justifikasi penentuan pagu program dan kegiatan yang mendukung lebih dari satu indikator, Belum lengkapnya dokumen perencanaan pada tingkat kabupaten dan Adanya mutasi penanggungjawab kegiatan SDGs di tingkat Kabupaten.

Menanggapi hal ini adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Tim Koordinasi TPB/SDGs tingkat Provinsi,
2. Meningkatkan Integrasi TPB/SDGs kedalam agenda pembangunan daerah:
 - a. Mengintegrasikan target&indikator TPB/SDGs kedalam RENCANA STRAOPD;
 - b. Mengintegrasikan target dan indikator TPB/SDGs kedalam RKPD dan Dokumen Penganggaran Daerah;
3. Menyelaraskan RAD TPB/SDGs (sebagai “Wadah/Payung”) dengan berbagai RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD-Pangan dan Gizi, RAD-GRK, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll.
4. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah selaras dengan TPB/SDGs didukung dengan sumber daya yang memadai sesuai dengan kewenangan, serta didukung dengan data dan informasi yang diperlukan.
5. Membangun Kerja sama antar Pemda Provinsi, dan antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta organisasi non-pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan RAD-TPB/SDGs;
6. Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs di daerah;
7. Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi pelaksanaan TPB/SDGs kepada seluruh masyarakat

8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs secara

Kesimpulan

Merumuskan peta jalan (road map) percepatan pencapaian SDGs untuk mempercepat pencapaian target SDGs. Selanjutnya roadmap tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan provinsi Riau. Rencana aksi Daerah ini diharapkan pihak-pihak terkait di provinsi Riau maupun kabupaten memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target SDGs di daerah.

Percepatan harus dilakukan untuk memberikan hasil pada waktunya, pembiayaan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi diperlukan agar setiap orang dapat membuat SDGs sukses di Provinsi Riau. Percepatan pencapaian SDGs melalui RAD SDGs ini memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah kabupaten dan kota, mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai semua sasaran SDGs di Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

- Elliot, Jenifer A. (2006) *Introduction to Sustainable Development*. New York: Routledge
- Ishartono & Raharjo, Santoso Tri. 2015. “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan.” *Social Work Jurnal* 0042: 159–67.

- Ngoyo, Muhammad Fardan. 2015. "Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan." *JurnalSosioreligius* 1(1): 77-88.
- Pribadi, Roy Eka. 2017. "IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA." 5(3): 917-32.
- Wahyuningsih, Wahyuningsih. 2018. "Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam." *Jurnal Bisma* 11(3): 390-99.

Dokumen

- Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 Tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- UNDP, 2015 Konvergensi Agenda Pembangunan Nawacita, RPJMN dan SDGs.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017-2019
- Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017-2019